



isipajak.com

"Pajak Aman, Usaha Cuan, Hati Tenang"

PENGUSAHA MELEK PAJAK

STRATEGI MENGHADAPI
PEMERIKSAAN



PROFILE :

Erfin Hadiwaluyo SE., S.Sos.,S.H., MA, BKP., CFP

- Founder [Isi Pajak.com](http://IsiPajak.com)
- Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (14 Tahun)
- Sertifikasi konsultan pajak – lisensi C (internasional) dari Kementerian Keuangan Indonesia
- Pemateri UI (Universitas Indonesia)
- Pemateri STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara)
- Berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang perpajakan
- Tim tenaga ahli perpajakan di roadmap Ecommerce Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Certified Profesional Coach dan Certified Bussines dari Internasional Coach Federation (ICF)
- Kuasa hukum pajak

▪ Pemateri pajak di GBC

▪ Alumni GBC

- Pemateri IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)
- Pemateri IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

www.isipajak.com

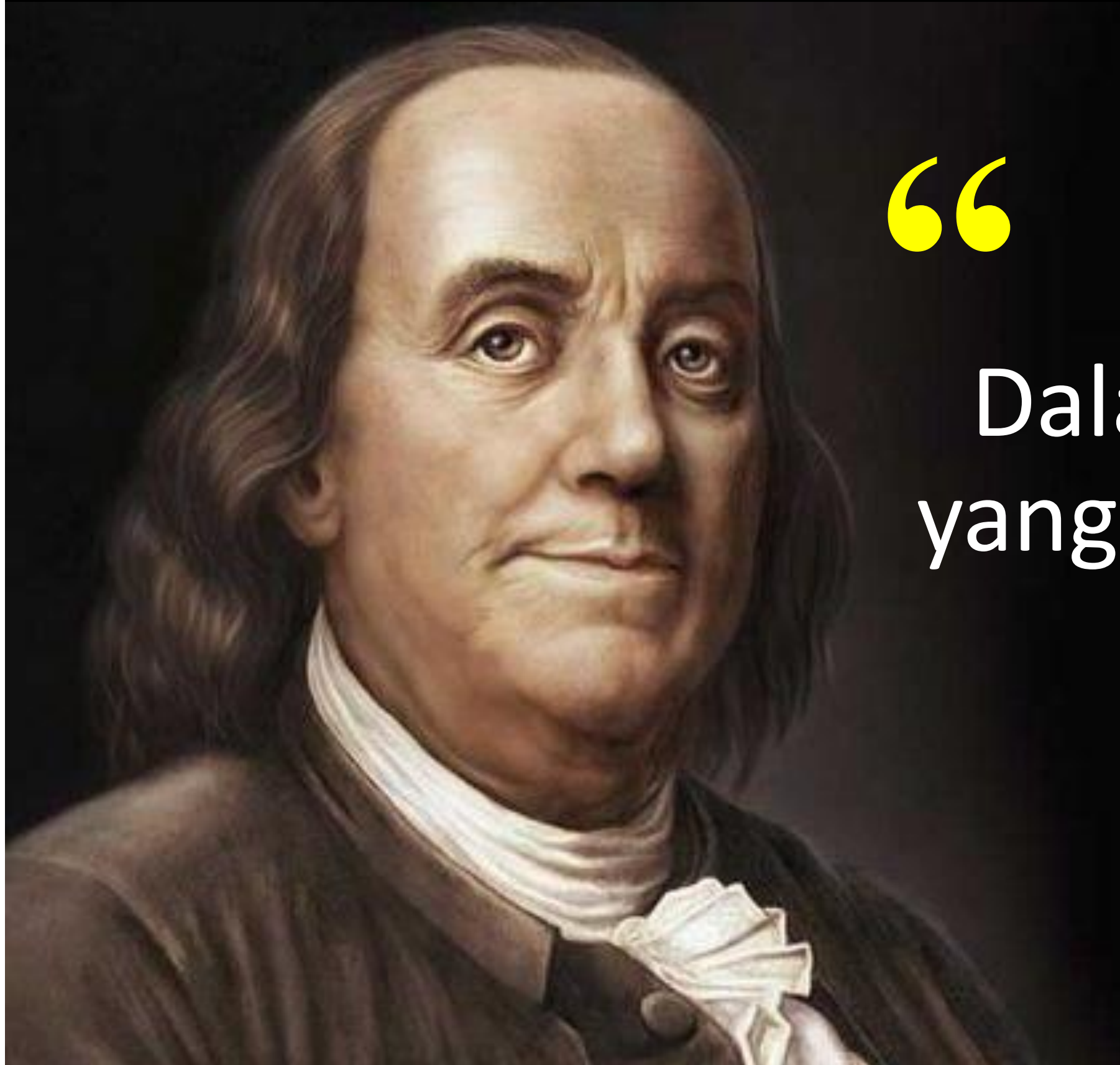
dan bea cukai di pengadilan pajak



“

Dalam hidup ini tidak ada
yang pasti, kecuali kematian
dan pajak.

BENJAMIN FRANKLIN



1. Definisi pajak

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat



2. Kenapa harus meleak pajak

1. Financial

- 1) Kerugian karena sanksi pajak
- 2) Terhambat cash flow bila ada sanksi pajak
- 3) Bila ada panggilan dari kantor pajak menambah beban transportasi
- 4) Bila ada pemblokiran rekening menghambat transaksi

2. Pemeriksaan pajak

1. Kerugian waktu dan pemikiran
2. Kerugian karena adanya sanksi perpajakan
3. Bisa dilakukan pemblokiran rekening
4. Butuh dokumen yang lengkap untuk pembuktian
5. Bisa dilakukan gizeling

Sub Bahasan

Pemeriksaan Pajak

(PMK 15 tahun 2025)

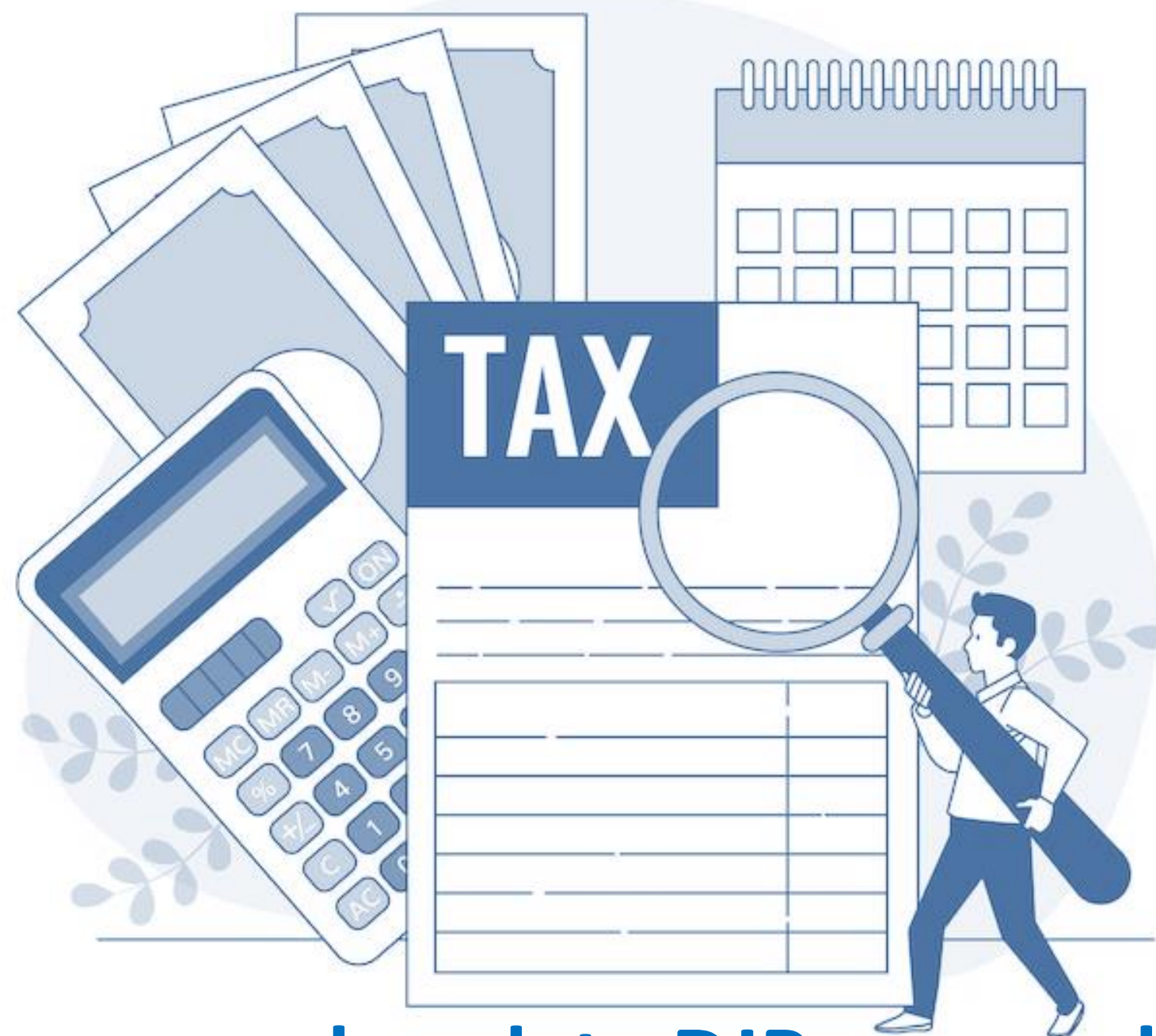


"Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk mengetahui kejelasan pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak."

Alasan dilakukannya pemeriksaan pajak ada 2, yaitu :

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang biasanya akan menghasilkan produk hukum yaitu surat ketetapan pajak atau STP dan
2. Tujuan kedua yakni tujuan lain yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Beberapa sumber data DJP menggali pajak

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Redaksi DDTNews | Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB

A⁺ A⁻       7



Petugas KPSP Rambang saat berkunjung ke salah satu wajib pajak. (foto: DDP)

Petugas Pajak Mulai Aksi Door to Door, Awas Kena Ciduk!

NEWS - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

02 October 2021 10:15

SHARE |  



Foto: cover topik/Door to Door Petugas Pajak_cover/Aristya Rahadian

Core Tax System

Sri Mulyani Cs Gunakan Sistem Pajak Canggih di 2024

NEWS - Anisa Sopiah, CNBC Indonesia

15 March 2023 15:45

SHARE |



“Core Tax System adalah pembaruan sistem administrasi itu meliputi, organisasi, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data”.

Intergrasi perpajakan dalam coretax (wajib pajak, internal DJP dan Pihak ketiga) :

Registration, compliance risk management, criminal investigation, payment, tax payer services, ekstensification, third party processing, exchange of information, taxpayer account management, tax supervisory, Audits, Valution, Non Objection, Objection and Appeal Collection, operasional , document management system, data quality management, bussines intelegence, knowledge management

coretaxdjp.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/bank-details

Versi: 1.1.2-build-2017 id-ID Baru 25 November 2025 10:10:34

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

Detail Bank

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

- Ikhtisar Profil Wajib Pajak
- Informasi Umum
- Alamat
- Detail Kontak
- Pihak Terkait
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Detail Bank**
- Data Unit Keluarga
- Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- Nomor Identifikasi Eksternal
- Jenis Pajak
- Wakil/Kuasa Saya
- Wajib Pajak yang Diwakili
- Verifikasi Dua Langkah
- Permohonan Tertunda

Aksi	Nama Bank ↑↓	Nomor Rekening Bank ↑↓	Jenis Rekening Bank ↑↓	Nama Pemilik Rekening Bank ↑↓	Apakah Rekening Bank Utama	Tanggal M
	Pilih Nama Bank ▼		Pilih Jenis Rekening Bank ▼			
Lihat	PT P		Akun pribadi		☒	26-04-202
Lihat	P		Akun pribadi		☐	26-04-202

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▼

☐ Tampilkan Riwayat

DJP Aktif di Medsos dan Pantau WP di Medsos



Akun Twitter DJP (tangkapan layar)

Sejak 2017 DJP bisa akses langsung data Bank

Ditjen Pajak telisik data nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar ke atas, ada apa?

Kamis, 28 November 2019 / 06:30 WIB



Pemadanan NPWP dan KTP



The screenshot shows the top portion of a news article on the tempo.co website. The header includes the tempo.co logo with the tagline 'BICARA FAKTA', a search bar with the placeholder text 'Cari Berita', and a 'TEMPO EKSKLUSIF' dropdown menu. Below the header is a navigation bar with links for 'Terbaru', 'Terpopuler', 'News', 'Multimedia', 'Seleb', 'Gaya Hidup', and 'Olahraga'. The main headline of the article is 'DJP Ingatkan Wajib Pajak Ganti NPWP dengan NIK, Apa yang Perlu Diperhatikan?'. Below the headline, the reporter is listed as 'Moh. Khory Alfarizi' and the editor as 'Grace gandhi'. The article's timestamp is 'Kamis, 9 Februari 2023 14:21 WIB'.

tempo.co
BICARA FAKTA

Cari Berita

TEMPO EKSKLUSIF

< Terbaru Terpopuler News Multimedia Seleb Gaya Hidup Olahraga

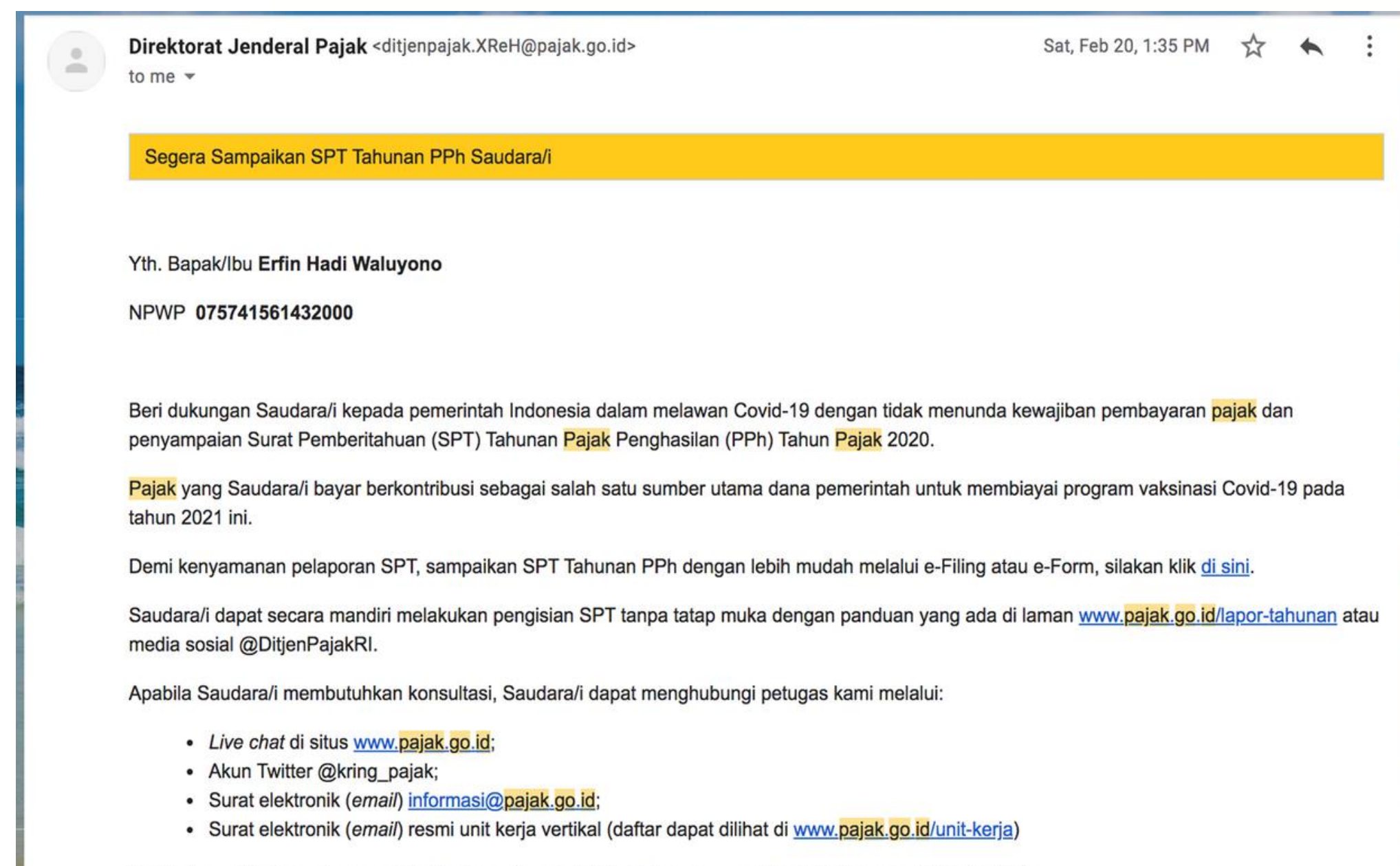
DJP Ingatkan Wajib Pajak Ganti NPWP dengan NIK, Apa yang Perlu Diperhatikan?

Reporter: Moh. Khory Alfarizi
Editor: Grace gandhi

Kamis, 9 Februari 2023 14:21 WIB

Tahapan – Tahapan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak menguji kepatuhan

1. Himbauan Melalui Email/Surat



Cara menyelesaikan surat himbauan

1. Mengecek isi surat/email himbauan tersebut apakah ada yang belum di penuhi kewajiban perpajakannya
2. Bila ada, maka segera di selesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan surat/email himbauan



2. Pengiriman SP2DK oleh KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA UTARA
JL. WALANG BARU NO.10, PLUMPANG, SEMPER, JAKARTA UTARA
TELEPON 4373839-40, FAKSIMILE (021) 4373842, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : SP2DK-606/WPJ.21/KP.09/2021
Sifat : Sangat segera
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

23 September 2021



Cara menyelesaikan SP2DK

1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang di tanyakan dalam sp2dk
2. Mengklasifikasikan masalah sesuai jenis pajaknya
3. Mengumpulkan bukti – bukti yang mendukung penyelesaian dari masalah yang sudah di klasifikasikan
4. Menbuat surat tanggapan sesuai



5. Bila belum siap surat tanggapan SP2DK hubungi AR yang ada di SP2DK untuk meminta waktu tambahan
6. Bertemu dengan AR untuk membahas surat tanggapan
7. Meminta Berita Acara untuk penyelesaiannya
8. Melakukan pembetulan SPT sesuai dengan hasil pembahasan SP2DK

3. Pemeriksaan Oleh Ditjen Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT
GEDUNG KPP MADYA JAKARTA LANTAI 10-11, JALAN M I RIDWAN RAIS NOMOR 5A-7 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3442713; FAKSIMILE (021) 3442774. LAMAN www.pajak.go.id, LAYANAN INFORMASI DAN
PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200. SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-4507/WPJ.05/KP.08/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Panggilan Dalam Rangka Pertemuan
Sehubungan dengan Pemeriksaan

27 Oktober 2021



Cara menyelesaikan Pemeriksaan

1. Memastikan tahun pajak dan jenis pajak yang di periksa
2. Memberikan dokumen sesuai dengan permintaan dokumen dalam surat pemeriksaan
3. Permintaan dokumen di berikan maksimal hingga Surat Peringatan II
4. Setiap pemberian dokumen baik soft file ataupun harf file harus ada tanda terimanya



5. Direktur memenuhi panggilan pertama
6. Selama proses hingga terbit SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) coperatif sesuai dengan peraturan yang ada
7. Membuat surat tanggapan SPHP sesuai dengan jatuh temponya dan bukti bukti yang kuat
8. Pada saat pembahasan akhir SPHP pastikan hanya menandatangani yang di setujui bila tidak setuju jangan di tanda tangani

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN

Nomor : 00005/206/16/051/20
Tahun Pajak : 2016
Tanggal Penerbitan : 14 Mei 2020
Tanggal Jatuh Tempo : 13 Juni 2020

	c.2. PPh Pasal 25	0	0	0
	c.3. PPh Pasal 29	630.997.809	630.997.809	630.997.809
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	c.5. Lain lain	0	0	0
	c.6. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	843.933.774	843.933.774	843.933.774
	d. Diperhitungkan :			
	d.1. SKPPKP	0	0	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	1.108.800.750	898.259.680	898.259.680
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	0	546.916.320	546.916.320
20	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		262.519.834	262.519.834
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
	g. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	0		809.436.154

F.5.1.23



4. Penagihan pajak dengan surat paksa

Jreeng! Nunggak Pajak Rp6 M, Pengusaha Ini Disandera DJP

NEWS - Tim Redaksi, CNBC Indonesia

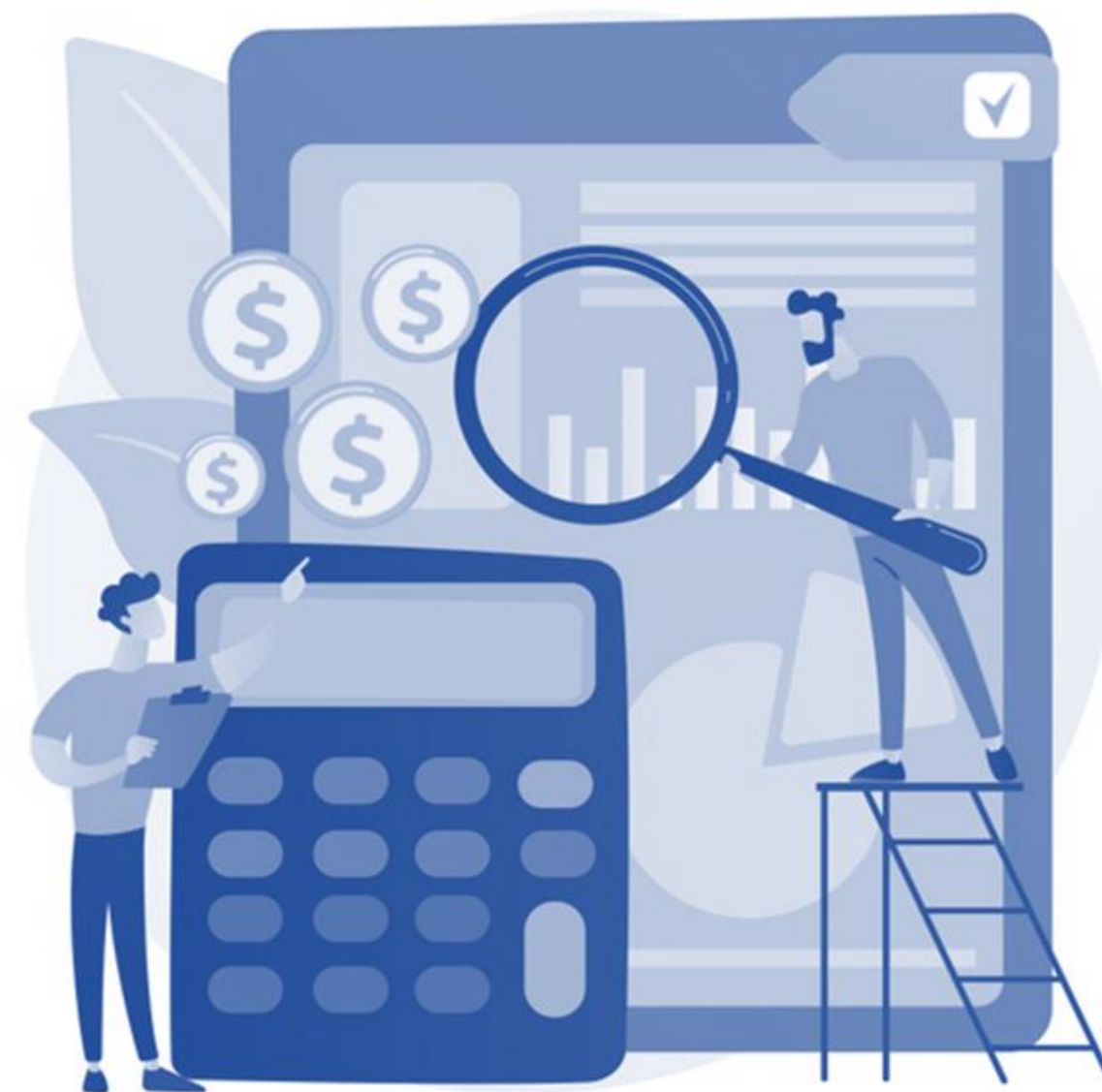
16 February 2023 18:22

SHARE |



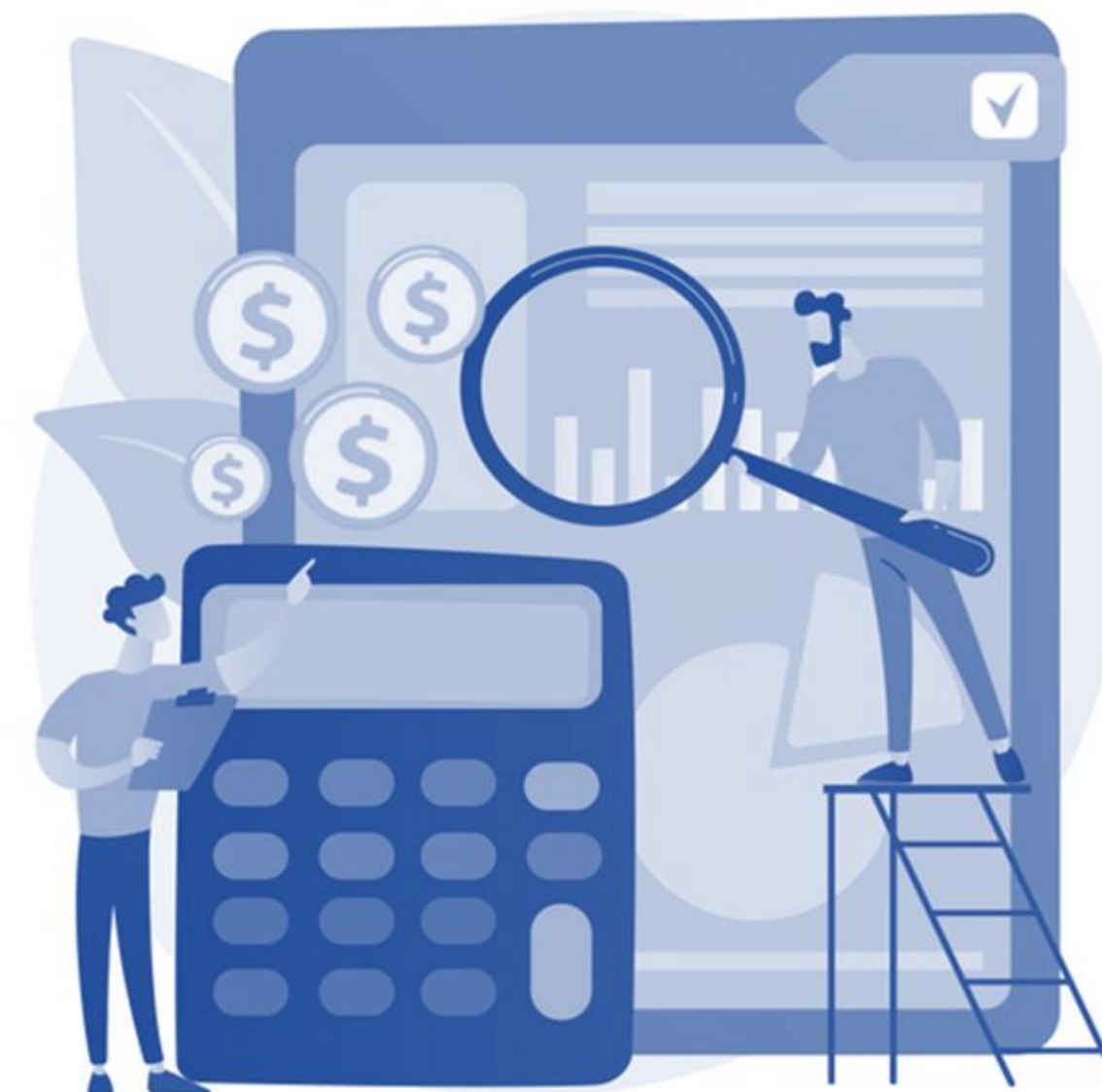
Kenapa di periksa pajak?

- Tidak melakukan pelaporan pajak (Surat Pemberitahuan baik masa atau tahunan)
- Ada data harta yang tidak sesuai dengan pelaporan pajak kita baik untuk orang pribadi ataupun perusahaan
- Ada penghasilan yang tidak dilaporkan tetapi dilaporkan oleh pihak lain



Kenapa di periksa pajak?

- Adanya Data perbankan yang bisa di akses oleh direktorat jenderal pajak
- Adanya transaksi jual beli tanah yang asal usul harta tersebut belum di lakukan pembayaran pajaknya
- Adanya akses direktorat jenderal pajak ke data kepemilikan saham di kemenkumham
- Karena random Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan





Resiko di periksa pajak

Resiko di Periksa Pajak

- Waktu yang tersita
- Kerepotan yang dihadapi dalam pengumpulan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak
- Temuan pajak yang kurang di bayar
- Sanksi perpajakan bunga 2% perbulan, kenaikan hingga 100% dan denda



**DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN**

Nama WP : NPWP : Alamat WP :		
NO.	JENIS/NAMA BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN	KETERANGAN
I.	Data Perpajakan	
1	SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran dan SSP	Tahun Pajak 2019
1	SPT Masa PPN/PPn. BM beserta lampiran, FP Keluaran, dan FP Masukan	Tahun Pajak 2019
3.	SPT Masa PPh Pasal 21/26., SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), beserta lampiran dan SSP	Tahun Pajak 2019
II.	Data akuntansi & dokumen perusahaan	
1	Copy Akte Pendirian, akte perubahan modal (sampai dengan perubahan terakhir)	
2	Company Profil	
3	Struktur Organisasi Usaha dan Susunan Pengurus	
4	TP Doc	Tahun Pajak 2019
5	Daftar akun (<i>chart of account</i>), neraca percobaan (<i>trial balance</i>), buku besar (<i>general ledger dan sub ledger</i>)	Tahun Pajak 2019
6	Laporan PPIC (<i>Production Planning Inventory Control</i>) dan Laporan Produksi (<i>Production Report</i>) Daftar rekonsiliasi/reklasifikasi akun-akun dari general ledger ke laporan keuangan dan dari laporan keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan	Tahun Pajak 2019
7	Softcopy dan Daftar pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk komisaris, direksi, karyawan tetap, dan karyawan tidak tetap, serta honorarium/fee yang dibayarkan kepada pihak lain; termasuk daftar pembayaran pesangon	Tahun Pajak 2019
8	Daftar aktiva tetap (termasuk aktiva tidak berwujud (jika ada)) yang memuat nama/jenis aktiva, tahun perolehan, harga perolehan, golongan dan tarif sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan serta perhitungan penyusutan berikut bukti kepemilikan dari aktiva bersangkutan	Tahun Pajak 2019
9	Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List, Bukti pembayaran impor, dan dokumen lain sehubungan dengan impor.	Tahun Pajak 2019
10	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Bukti pembayaran Ekspor, dan dokumen lain sehubungan dengan Ekspor.	Tahun Pajak 2019
11	Rekening Koran semua bank (yang terkait dengan pemasukan/pengeluaran baik atas nama sendiri/perusahaan maupun lainnya)	Tahun Pajak 2019

Tenang

Tidak perlu takut, apalagi overthinking

WP Pengusaha CERDAS



WP CERDAS

- Melakukan Pelaporan pajak yang diwajibkan baik setiap masa (bulan) atau setiap tahun
- Melakukan manajemen pajak dengan baik
- Melakukan diagnosa risiko perpajakan setiap tahunnya

Bagaimana WP CERDAS Menghadapi Pemeriksaan Pajak

- Tenang Menghadapinya
- Menyiapkan data yang diperlukan saja oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Melakukan penghitungan sendiri (Analisa) untuk mengetahui resikonya

Antisipasi agar tidak di periksa pajak

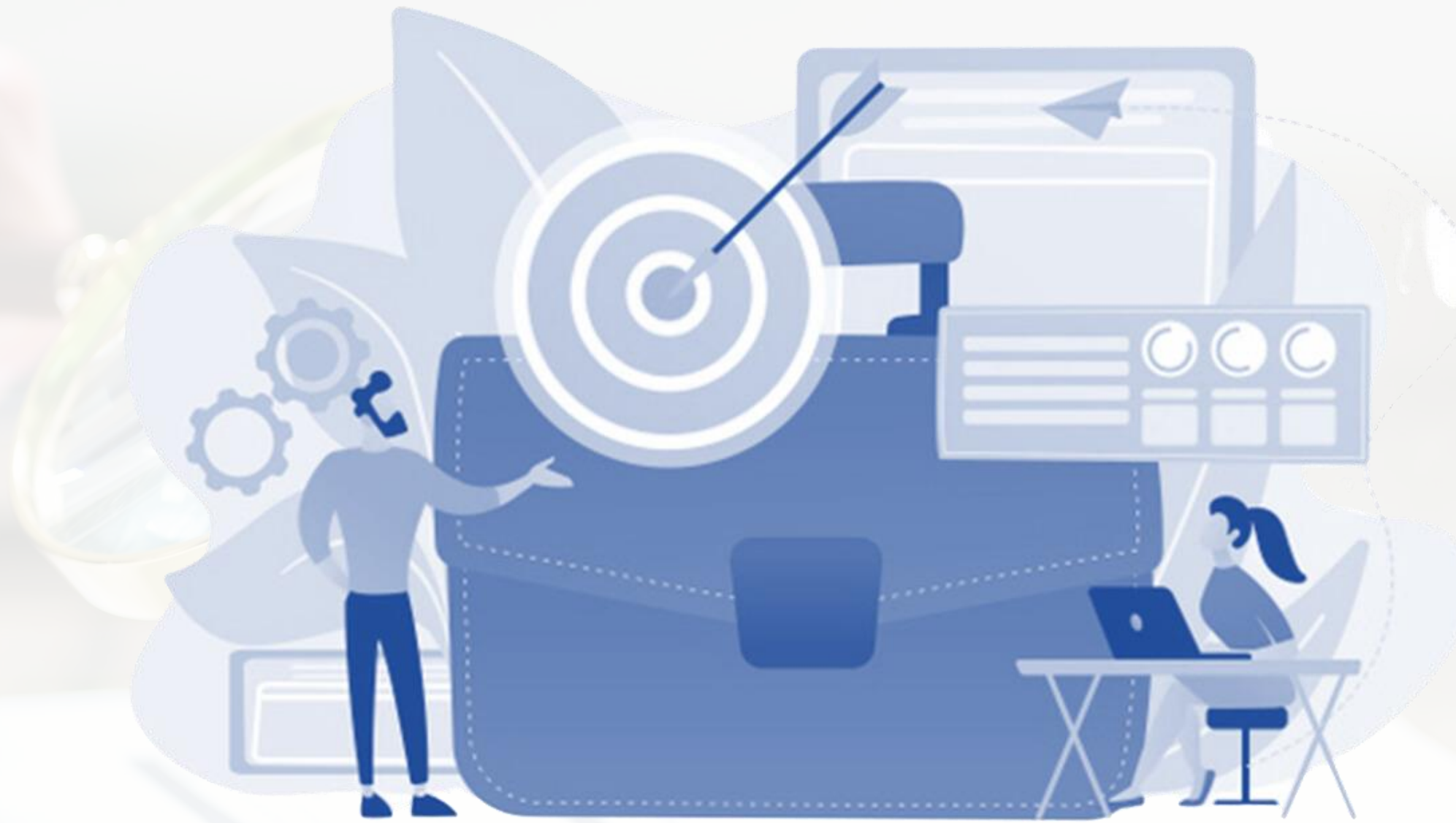
- Melakukan pelaporan pajak yang diwajibkan baik setiap masa (bulan) atau setiap tahun
- Melakukan manajemen pajak
- Melakukan diagnosa risiko perpajakan setiap tahunnya



Bagaimana Menghadapi Pemeriksaan Pajak

- Tenang menghadapinya
- Menyiapkan data yang diperlukan saja oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Melakukan penghitungan sendiri untuk mengetahui risiko perpajakan yang akan dikenakan
- !! Melakukan diagnosa risiko perpajakan setiap tahunnya

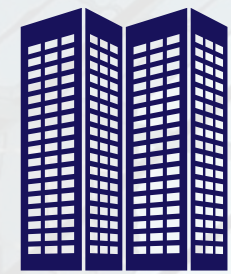




Didampingi oleh konsultan pajak profesional, resmi dan berpengalaman.

Anda hanya perlu focus pada pengembangan usaha Anda saja.

- **GKM Green Tower Lantai 2 Unit 205.**



**Jl. TB Simatupang Kav. 89 Jakarta
Selatan**

- **Graha Pena Lantai 19 Unit 1923. Jl. Ahmad**

 **tanya@isipajak.com**

 **021 783 42714 / 0821 808 800 85**